



# Pontianak Empat Kali Raih WTP

## Sukses Terapkan Akrual Basis

**PONTIANAK**, TRIBUN - Pemerintah Kota Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPd) 2014. Iri kali keempat Pemkot Pontianak meraih predikat WTP.

Predikat WTP diraih berturut-turut sejak 2011, 2012, 2013 dan 2014. Pemkot Pontianak juga berhasil menjadi kabupaten/kota yang pertama menerapkan laporan

keuangan dengan sistem akrual basis. Sistem ini pada 2016 mendatang wajib di terapkan semua kabupaten/kota di Kalbar.

Kepala Perwakilan BPK

Kota Pontianak yang pertama kali sudah menerapkan sistem akrual basis dan hasilnya tetap bertahan WTP. ■

**DIDI BUDI SATRIO**

Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar

Predikat WDP di antaranya Katong Utara, Sambas, Melawi dan Bengkayang. Sedangkan yang belum melengkapi yaitu Singkawang, Sambas dan Mempawah. "Tahun ini ada tiga entitas yang naik peringkatnya dari WDP menjadi WTP yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang," papar Didi usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Adapun tujuh kabupaten/kota yang meraih predikat WTP dengan paragraf penjelasan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bersambung ke Hal. 15 ■



## Pontianak Empat Kali Raih WTP

LKPD Kota Pontianak 2014 di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (3/7).

Didi juga meminta kabupaten/kota yang lain untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sistem laporan keuangan berbasis akrual yang mulai diterapkan 2016 mendatang.

Dikatakannya, akrual basis tidaklah semudah yang dibayangkan karena membutuhkan niat dan tekad yang keras, posisi-posisi kunci harus dipertahankan atau ditingkatkan, persiapan sistem harus segera diterapkan.

"Kota Pontianak yang pertama kali sudah menerapkan sistem akrual basis dan hasilnya tetap bertahan WTP. Saya berharap kepada bapak-bapak, tahun depan jangan segan-segan untuk

berdiskusi dengan kami di BPK," imbuhnya.

Mengingat kompleksitas laporan yang dibuat dalam akrual basis, hal itu tentu membutuhkan perhatian yang cukup besar. Betapa tidak, sebelum diterapkan akrual basis, laporan yang dibuat hanya sebanyak empat laporan.

Namun dengan akrual basis laporan yang dibuat menjadi tujuh laporan yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

"Kami harapkan semua pemerintah daerah mempersiapkan perangkat keras maupun perangkat lunak terutama terkait kebijakan akuntansi

khususnya pengelolaan aset tetap dan penyusutan aset tetap," pintanya.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji menuturkan, kesia-pan menggunakan sistem akrual basis agar pada saat diberlakukan sudah mulai terbiasa. "Sehingga lebih mudah memperbaikinya dari pada nanti baru mulai menerapkan akrual basis," katanya.

Diungkapkannya, dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual, pihaknya tidak terlepas dari supervisi dan arahan-arahan dari jajaran auditor BPK untuk penerapan laporan keuangan berbasis akrual.

"Saya terima kasih kepada BPK karena kita terus dilakukan supervisi dan diberikan arahan-arahan untuk

Sambungan Hal. 9

penerapan laporan keuangan berbasis akrual. Bagaimanapun, auditor kita terbatas kemampuannya, sedangkan BPK para auditornya memang ahli di bidang itu," tutur Sutarmidji.

Ia mengakui, WTP yang diraih Pemkot keempat kalinya ini tetap masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

Bahkan, Sutarmidji berjanji memimpin langsung perbaikan laporan keuangan baik itu terkait catatan-catatan dari predikat WTP maupun hasil audit.

"Paragraf penjelasan dari opini WTP itu sebagian besar masalah aset. Saya minta itu harus tuntas, jangan sampai berlarut-larut dan menambah pekerjaan rumah," imbuhnya. (qky)